

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial antara kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X1 yang memperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 1,757 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,666 , artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikannya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima.
2. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang kesehatan terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kesenjangan fasilitas daerah dibidang kesehatan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X2 yang memperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 0,591 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,666 artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikannya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak.
3. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial

antara kesenjangan fasilitas daerah dibidang infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X3 yang memperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 1,121 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,666 artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikannya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak.

4. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara simultan antara kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X1, X2 dan X3 yang secara simultan memperoleh hasil  $f_{hitung}$  sebesar 2,863 dan  $f_{tabel}$  sebesar 2,708 , artinya  $f_{hitung} < f_{tabel}$  dan nilai signifikannya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan mampu melihat dengan jeli kebutuhan-kebutuhan akan pembangunan daerah sehingga semua daerah dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata dan tidak terjadi masalah kesenjangan antar daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan dapat memperpanjang periode pengamatan dan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh kesenjangan fasilitas daerah terhadap alokasi belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani. (2013). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi Daerah, Vol. 1, No. 1. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Bastian, I. (2003). *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, P. dan Suyanto. (2015). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja modal Pada Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ks. Lazyra. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Belanja Modal.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M. (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Prof. Dr. Elfindri, M.A dan Dr. Hendro Ekawarso, M.Si. dan Dr. Zamzami, M.Si. (2018). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Prof. Sauri, S. (2002). *Pengembangan Strategi Pendidikan*. Jurnal Mimbar Pendidikan, Vol. 22, No. 1. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Putra, A. (2015). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Jember. Jember.
- Ritmon A. & Mayang. A (2018). *Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 2. IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Smith, M. Todaro. (2003). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi 8. Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah. 2009. Permata Pers. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendanaan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.